

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 SIMPULAN**

Dalam bab II, telah dijelaskan bahwa sebagai bagian dari Gereja, panggilan kaum awam untuk merasul menjadi tanggungjawab yang perlu dilaksanakan untuk menyucikan dunia, terutama melalui ciri dan statusnya di masyarakat. Dalam bab III, dengan melihat keterkaitan antara Gereja dan politik yang memiliki tujuan yang sama, yaitu *bonum commune*, partisipasi kaum awam dalam berpolitik pun harus ditempatkan pada jiwa kerasulan sebagai wakil Gereja. Sedangkan dalam bab IV, telah dipaparkan juga situasi Keuskupan Bandung, di mana antusiasme di bidang politik sangat tinggi sedangkan partisipannya cukup rendah. Beberapa partisipan melihat bahwa keterlibatan di bidang politik itu lebih ditujukan semata-mata demi kepentingan Gereja dan bukan atas dasar nasionalisme.

Berpolitik sebagai suatu usaha untuk menguduskan dunia menjadi salah satu bidang terpenting yang harus dikembangkan dalam diri kaum awam yang memiliki ciri sekuler, yaitu hidup di tengah-tengah dunia secara nyata. Dalam diri awamlah Gereja semakin dapat menghadirkan dirinya di bidang politik sebagai pengikut Kristus yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam ajaran kasih

kepada sesama. Kehadiran Gereja di bidang politik melalui kaum awam tentunya menjadi wujud dari panggilan Gereja untuk melayani. Dengan demikian makna partisipasi atau keterlibatan kaum awam di bidang politik itu mengandung makna pelayanan Gereja untuk hadir di tengah-tengah dunia dan menyucikan dunia. Kurangnya keterlibatan Gereja di bidang politik tentunya menjadi masalah yang perlu ditanggapi secara serius, terutama bagaimana Gereja dapat mengajak seluruh kaum awam untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan politik.

Tanggungjawab untuk terlibat dalam dunia politik tentunya menjadi tanggungjawab seluruh Gereja, karena mau tidak mau Gereja tinggal dan hidup di tengah-tengah situasi politik suatu negara. Gereja dalam hal ini menyangkut anggota-anggotanya, yaitu kaum hierarki dan kaum awam. Artinya kendati dalam konteks hierarki, imam tidak bisa berpolitik secara praktis namun dalam konteks sebagai gembala, para imam dapat menjadi guru bagi kaum awam yang memiliki minat dan bakat di bidang politik. Tanggungjawab bersama sebagai satu Gerejalah yang semakin dapat mendorong kaum awam untuk dapat melihat politik secara positif, sebagai wujud pelayanan dan juga memujudnyatakan pelayanan itu dalam keterlibatannya secara praktis di bidang politik. Hal tersebut tentunya menjadi dasar bagi Gereja untuk memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada kaum awam untuk tidak hanya menjadi wakil dari Gereja dan untuk kepentingan Gereja saja, melainkan usaha tersebut dimaksudkan demi mewujudkan Gereja Indonesia yang peduli dengan masa depan negara Indonesia. Dengan melihat lagi bahwa tujuan politik dan tujuan Gereja itu sebenarnya sehalu, yaitu demi

mengusahakan kesejahteraan bersama, maka setiap anggota Gereja pun dituntut untuk memaknai keindonesiaannya sebagai umat Allah.

Dalam konteks Keuskupan Bandung, berdasarkan situasi dan kerjasama yang telah ditawarkan dalam bab IV, keterlibatan kaum awam di bidang politik tentunya juga tidak hanya sebatas demi kepentingan Gereja semata. Keterlibatan atau partisipasi di bidang politik juga perlu dimaknai sebagai sebuah panggilan, yaitu panggilan berpolitik. Di sini panggilan berpolitik itu menyangkut dua hal, yaitu Gereja dan dunia. Posisi awam Katolik sebagai anggota Gereja tentunya memiliki tanggungjawab yang besar untuk memaknai semua keterlibatannya di bidang politik sebagai suatu panggilan. Panggilan berpolitik itu tidak mengandaikan Gereja mengutus wakil-wakilnya dalam diri awam sehingga lebih cenderung untuk mengambil keuntungan dalam bidang politik. Sebaliknya, kaum awam yang terlibat dalam dunia politik memiliki komitmen untuk mewujudkan pelayanan terhadap sesama, dalam hal ini pelayanan terhadap negara.

Dalam konteks Keuskupan Bandung pun panggilan berpolitik itu harus dapat menjadi dasar bagi Gereja untuk melayani dengan rendah hati, sesuai dengan visi dan misi Sinode Keuskupan Bandung 2015. Dengan mewujudkan Gereja yang melayani dengan rendah hati dalam bidang politik, tentunya visi dan misi tersebut dapat menjadi refleksi kaum awam bahwa keterlibatan di bidang politik itu bukanlah suatu usaha untuk mewujudkan kepentingan Gereja; agar Gereja dikenal, diakui dan mudah untuk mendirikan gereja. Memang dalam ketiga hal itu sangatlah penting untuk pembangunan gereja secara fisik, namun sangat sulit untuk melihat motivasi tersebut sebagai pembangunan Gereja secara

spiritual. Hal yang mungkin terjadi adalah keterlibatan itu akan dimaknai hanya sebatas demi ambisi semata. Secara tidak langsung Gereja sama saja dengan organisasi-organisasi politik lainnya yang hanya mengutus wakil-wakilnya demi kepentingan kelompok. Dengan demikian untuk memaknai keterlibatan kaum awam di bidang politik tentunya harus juga disertai dengan jiwa nasionalis sehingga setiap kaum awam pun semakin dapat memaknai spirit internal partisipasi Gereja, yaitu 100% Katolik dan 100% Indonesia, sebagaimana ajakan Mgr. Soegijapranata.

Melalui keterlibatan kaum awam di bidang politik, Gereja Keuskupan Bandung semakin dapat menempatkan politik sebagai salah satu fokus utama pelayanan Gereja, terutama dalam rangka persiapan Pemilihan Kepala Daerah 2018 dan Pemilihan Umum 2019. Artinya dengan melihat situasi bangsa berkaitan dengan tahun politik, Gereja juga perlu melihat situasi di dalam dirinya berkaitan dengan partisipasinya di bidang politik. Dengan demikian dengan melihat situasi diri dan di luar dirinya berkaitan dengan politik, tentunya menjadi evaluasi dan refleksi bagi Gereja untuk menentukan posisi dirinya sebagai warga Indonesia yang juga memiliki tanggungjawab untuk menentukan masa depan bangsa. Berkaitan dengan situasi politik tahun 2018, maka Gereja Keuskupan Bandung juga perlu mengambil perannya sebagai Gereja yang mau melayani, seturut dengan inspirasi orang Samaria yang baik hati sebagaimana yang terus diaktualkan dari masa jabatan Mgr. Alexander Djajasiswaja hingga Mgr. Antonius Subianto. Tentunya moto uskup Mgr. Antonius Subianto "*Ut Diligatis Invicem*", semakin melengkapi usaha Gereja untuk menjadi pelayan di bidang politik. Moto

tersebut tentunya menjadi model bagi Gereja Keuskupan Bandung untuk melayani secara nyata, secara khusus dalam bidang politik. Memang bidang politik bukanlah satu-satunya fokus pelayanan yang harus diperjuangkan, karena masih banyak bidang-bidang lainnya yang juga harus dikembangkan. Namun berkaitan dengan situasi politik zaman sekarang yang selalu menyuarakan isu-isu sara dan juga berkaitan dengan persiapan Pemilihan Kepala Daerah 2018 dan Pemilihan Umum 2019, maka bidang politik itu harus menjadi fokus utama untuk mewujudkan Gereja yang melayani dengan rendah hati.

## **5.2 Tantangan dan Jalan Keluar**

Ada beberapa tantangan yang dapat dilihat di tahun 2017-2018 yang perlu Gereja Keuskupan Bandung lihat, baik dari yang sifatnya pribadi maupun komunal. Tiga tantangan tersebut meliputi isu SARA, apatisme dan permainan politisasi Gereja.

### **5.2.1. Isu SARA**

Isu-isu yang sangat mempengaruhi situasi politik di Indonesia dari tahun ke tahun adalah suku, agama, ras dan antargolongan. Secara khusus isu agama dan ras sering dipermasalahkan dalam dunia politik Indonesia. Tentunya ini tidak hanya menjadi tantangan bagi Gereja, namun juga menyangkut masa depan bangsa Indonesia yang melupakan kebhinekaannya. Hal inilah yang membuat etnis dan agama tertentu sulit untuk terjun langsung di dalam dunia politik, secara khusus sebagai pemimpin politik. Memang masalah etnis dan agama tidak hanya

dirasakan dalam dunia politik, tetapi juga dalam hal kemanusiaan yang menyangkut ketidakadilan, penindasan dan kekerasan. Ini tidak hanya menyangkut siapa yang boleh jadi pemimpin atau tidaknya, tetapi juga menyangkut tingkat antusiasme mayoritas kepada yang dipilihnya. Kecenderungannya adalah para partisipan dari etnis dan agama minoritas sangat kurang dihargai, baik di kalangan pemerintahan maupun masyarakat sehingga sulit untuk mencari kepercayaan sebagai pemimpin politik.

Dalam hal ini, Gereja perlu menempatkan diri sebagai sosok yang netral dan bukan sebagai minoritas. Kendati yang beragama Katolik sulit diterima atau terpilih sebagai pemimpin politik, namun Gereja harus menempatkan diri sebagai sosok yang rendah hati. Artinya di tengah situasi tersebut, Gereja tidak boleh bermental “tertindas” sehingga memposisikan diri sebagai sosok yang perlu melawan. Sebaliknya melalui kaum awam, Gereja harus tetap mengusahakan partisipasi aktif apapun situasinya. Salah satu caranya adalah kaum awam tetap menyuarakan tindakan pelayannya sebagai orang yang menjunjung tinggi nasionalisme. Dengan demikian Gereja tetap bersikap netral dengan mengusahakan terwujudnya situasi politik Indonesia yang baik.

### **5.2.2. Apatisme**

Apatisme, yakni ketidakpedulian kaum awam di bidang politik, menjadi masalah personal yang dihadapi oleh kaum awam, dan

dampaknya juga dapat dirasakan secara komunal dalam kehidupan menggereja dan bernegara. Ketidakpedulian sangat dikaitkan dengan kurangnya tindakan partisipasi kaum awam untuk mengetahui dan terlibat di dunia politik. Dalam bab IV dipaparkan bahwa kurangnya partisipasi di bidang politik dikarenakan oleh beberapa alasan, yaitu pekerjaan, kekecewaan karena tidak diberi ruang untuk berpolitik<sup>152</sup> dan pandangan bahwa politik itu kotor. Ketiga masalah tersebut haruslah menjadi fokus bagi Gereja, terutama kaum klerus dalam mendampingi dan memberikan motivasi politik kepada kaum awam. Setidaknya Gereja tetap mengusahakan keterlibatan kaum awam untuk mengetahui dan terlibat dalam kehidupan politik. Jalan keluar yang mungkin dapat dilakukan adalah kegiatan seputar seminar politik, sebagaimana yang telah diusahakan Kerasulan Awam Keuskupan Bandung dan VOX POIN Bandung Raya di tahun 2017-2018 sehingga antusiasme dan kepercayaan umat di bidang politik semakin terbangun.

### **5.2.3. Permainan Politisasi Gereja**

Sebenarnya permainan politisasi Gereja tidak berhubungan langsung dengan hierarki Gereja, namun lebih berhubungan dengan bagaimana usaha Gereja untuk mencari kepentingan di bidang politik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam hal ini perlu dipertanyakan lagi bahwa keterlibatan Gereja di bidang politik itu apakah

---

<sup>152</sup> Kekecewaan ini dikarenakan para partisipan yang gagal mencalonkan diri sehingga memutuskan untuk menutup dirinya. Kekecewaan tersebut di nampak dalam sikap untuk tidak mau tahu tentang situasi politik dan tidak terlibat di bidang politik lagi.

berlandaskan pelayanan bagi sesama atau untuk demi kepentingan Gereja. Memang di Keuskupan Bandung sendiri tidak mengajarkan untuk mengambil keuntungan di bidang politik. Namun beberapa kaum awam yang terlibat secara aktif di bidang politik tentunya memiliki pandangan yang berbeda dengan ajaran Gereja tersebut. Beberapa kaum awam di suatu Gereja tentunya memiliki cita-cita untuk dapat diakui dan terkenal baik di masyarakat dan Gereja. Kecenderungan inilah yang mungkin membuat mereka yang terjun di bidang politik memiliki motivasi lain yang berkaitan demi kepentingan Gereja; agar Gereja diakui, diterima dan agar ijin pembangunan gereja dipermudah. Hal ini menunjukkan tantangan baru dalam diri Gereja, terutama dalam diri awam yang hingga saat ini pun masih memiliki motivasi yang tidak disesuaikan dengan ajaran Gereja. Tugas Gereja adalah mendampingi setiap kaum awam untuk memurnikan motivasi keterlibatan politiknya pada pelayanan kepada sesama. Artinya keterlibatan kaum awam di bidang politik tidak semata-mata demi kepentingan Gereja, melainkan demi mewujudkan Gereja yang melayani. Para partisipan politis di Keuskupan Bandung pun tentunya memiliki kecenderungan demikian sehingga dari hierarki Gereja pun perlu memurnikan motivasi mereka agar semakin mewujudkan visi-misi uskup, yaitu Gereja yang melayani dengan rendah hati.

## DAFTAR PUSTAKA

### DOKUMEN GEREJA

Konferensi Waligereja Regio Nusa Tenggara. *Katekismus Gereja Katolik*. Nusa

Indah: Ende. 2007

Konsili Vatikan II. “Dekrit Tentang Kegiatan Misioner Gereja” (*Ad Gentes*)

dalam Dokumen Konsili Vatikan II. Jakarta: Obor. 1993.

Konsili Vatikan II. “Dekrit Tentang Kerasulan Awam” (*Apostolicam*

*Actuositatem*) dalam Dokumen Konsili Vatikan II. Jakarta: Obor. 1993

Konsili Vatikan II. “Dekrit Tentang Pelayanan dan Kehidupan Para Imam”

(*Presbyterorum Ordinis*) dalam Dokumen Konsili Vatikan II. Jakarta:

Obor. 1993

Konsili Vatikan II. “Konstitusi Dogmatik Tentang Gereja” (*Lumen Gentium*)

dalam Dokumen Konsili Vatikan II. Jakarta: Obor. 1993

Paus Yohanes Paulus II. *Peran Serta Umat Katolik di Dalam Kehidupan Politik*.

Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI. Jakarta

Ensiklik Paus Yohanes Paulus II. *Centesimus Annus*. 1991

Imbauan Apostolik Pasca Sinode. “*Christi Fideles Laici; Para Anggota Awam*

*Umat Beriman Kristus*. Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.

Jakarta

*Kitab Hukum Kanonik*, Jakarta: Obor, 2016.

## PUSTAKA PENDUKUNG

- A, B. Jowett. M. *Politics of Aristotle* (New York: Oxford, 1885).
- Bacani, Teodoro C. *Church in Politic*. (Manila, 1992).
- Bagus, Loren. *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 1996).
- Barth, Karl. *Community. State and Church: Three Essay* (Gloucester: Peter Smith, 1968).
- Bentley, Wessel and Forster, Dion A.. *Between Capital and Cathedral: Essay on Church-State Relationships*. (South Africa: Research Institute for Theology and Religion University, 2012).
- Budiardjo, Meriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2003).
- Congar, Yves OP. *Lay People in the Church*. Trans. Donal Attwater (Marland: Newman Press, 1995).
- Dennis C. Mueller. *The State and Religion* (Vienna: Department of Economics University, 2015).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia : edisi II*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1999).
- Djiwandono, J. Soedjati. *Gereja dan Politik dari Orde Baru ke Reformasi*. (Yogyakarta: Kanisius, 2003).
- Dunn, James D. G. *The Theology of Paul the Apostle* (USA: WM. B Eerdmans, 1998).
- Gabriel, Manuel G. *John Paul II's Mission Theology In Asia* (Manila: Anvil Publishig, 1992).

- Heuken. A. *Ensiklopedia Gereja: Jilid IV* (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1989).
- Ilbrath, Lester dan Goel, M. L. *Political Participation* (Chicago: Rand McNally College, 1977).
- Jacobs, Tom. *Gereja Menurut Vatikan II* (Yogyakarta: Kanisius, 1987).
- Komisi Teologi KWI. *Kompendium Konsili Vatikan II* (Yogyakarta Kanisius, 2015).
- Kristiyanto, Eddy. *Semakin Mengindonesia: 50 Tahun Hierarki* (Yogyakarta: Kanisius, 2015).
- Lamb, Matthew L. dan Levering, Matthew. *Vatican II Renewal Within Tradition* (New York: Oxford, 2008).
- Leonard Doohan. *The Lay-Centered Church* (USA: Winston press, 1984).
- Manuel, Paul Christopher; Reardon, Laerence dan C. Eilcox, Cyde. *The Catholic Church and The Nation-State* (Washington D.C: Georgetown University Press, 2007).
- Masukan Umat. No 10. Hasil Sinode Keuskupan Bandung 2015. *Sehati Sejiwa Berbagi Sukacita*.
- Moyser, George. *Politics and Religion in the Modern World* (New York: Routledge, 1991).
- Olla, Paulinus Yan. *Dipanggil Menjadi Saksi Kristus* (Yogyakarta: Kanisius, 2008).
- Paige, Jeffry M. *Political Orientation and Riot Participation: American Sociological Review* (New York, 1971).

- Para Uskup Regio Jawa. *Ketentuan Pastoral Keuskupan Regio Jawa*. 2016.
- Pedoman Pastoral Keuskupan Bandung 1994-1999
- Peschke, Kalr-Heinz. *Etika Kristiani Jilid IV: Kewajiban Moral dalam Hidup Sosial* (Maumere: Ledalero, 2003).
- Rademcher, William J. *Lay Ministry: A Theological, Spiritual and Pastoral Handbook* (New York: Croosroad, 1991).
- Rapar, J.H. *Filsafat Politik Aristoteles* (Jakarta: Rajawali, 1998).
- Sanjaya, Indra dan Purwanto F. *Mozaik Gereja Katolik Indonesia: 50 Pasca Konsili Vatikan II* (Yogyakarta: Kanisius, 2015).
- Setiawan, Hendro. *Awam. Mau ke Mana?* (Yogyakarta: Kanisius, 2015).
- Singgih, Emanuel Gerrit. *Reformasi dan Tranformasi Pelayan Gereja Menyongsong Abad ke-21* (Yogyakarta: Kanisius, 2001).
- Sugiharto, Bambang dan Rachma, Agus. *Wajah Baru Etika dan Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 2009).
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010).
- Suseno, Frans Magnis. *Katolik itu Apa?* ( Yogyakarta: Kanisius, 2018).
- *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar dan Kenegaran Modern*. (Jakarta: Gramedia, 2015).
- Tim Sensus Keuskupan Bandung 2011. *Sensus Umat Katolik Keuskupan Bandung Tahun 2011* (Keuskupan Bandung, 2012).

## **MAJALAH**

“Tiga puluh Tujuh Kebijakan Hasil Sinode Keuskupan Bandung”. *Majalah*

*Komunikasi*. edisi 442. Desember. 2015

“Tiga puluh Tujuh Kebijakan Hasil Sinode Keuskupan Bandung Sudah Cukupkah

Orang Katolik Peduli?”. dalam *Majalah Komunikasi*. edisi 430.

Agustus2016

Mgr. Antonius Subianto Bunjamin. “Sudah Cukupkah Orang Katolik Peduli?”.

dalam *Majalah Komunikasi*. Edisi 430 Agustus 2016.

Mgr. Agustinus Agus. “Politik Sebagai Panggilan”. dalam *Majalah Komunikasi*.

edisi 341 Maret 2009.

Mgr. Antonius Subianto Bunjamin. “Keterlibatan Politik: Wujud Tanggungjawab

Kristiani”. dalam *Majalah Komunikasi*. edisi 451 Mei 2018. hlm 15

## **JURNAL**

Olsen, Marvin E. 1973. “*A Model of Political Participation Stratification*”. dalam

*Journal of Political and Military Sociology*. No. 1.

## **Internet**

[www.dokpenkwi.org](http://www.dokpenkwi.org) diakses pada 15 Februari 2018 pukul 09.00 WIB